BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengenaan Denda Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia oleh Majelis KPPU didasarkan pada Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dibuat untuk mengakomodir dari Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga kedudukannya merupakan di atas dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Akibat Ketidaksesuaian Denda dalam Putusan Majelis KPPU pada Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan yakni menimbulkan ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam menentukan besaran sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda, sebagaimana keringanan sanksi yang diberikan oleh Majelis KPPU seolah tidak membuat Terlapor merasa jera, namun sebaliknya para

pelaku usaha akan mencari celah dalam keringanan tersebut untuk terhindar dari hukuman yang semestinya. Pada Putusan Majelis KPPU terlihat adanya disparitas karena dalam menentukan denda, Majelis KPPU tidak melihat kerugian pelaku usaha lain yang terdampak selama kurun waktu terjadinya pelanggaran dengan hanya mengenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada Terlapor, yakni KPPU tidak memberikan denda maksimal pada pelanggar sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada instansi tersebut atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang merupakan intisari dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan guna mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan seperti beberapa kasus yang telah Penulis analisis sebelumnya, maka saran yang diberikan Penulis yakni sebagai berikut:

1. Atas kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi tindakan administratif kepada perusahaan pelanggar ketentuan pengambilalihan saham perusahaan, hendaknya KPPU dalam menentukan besaran denda sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Komisi yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha lain yang tidak patuh, terutama dengan mempertimbangkan keuntungan yang telah diperoleh oleh perusahaan pelanggar selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.

2. Dalam menentukan besaran denda, seharusnya Majelis KPPU juga melihat dampak negatif yang dilakukan pelaku usaha dalam kurun waktu terjadinya pelanggaran guna menghindari ketidakadilan pada masyarakat dan memberikan ketakutan tersendiri bagi pelaku usaha untuk tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.